

RUDYCT ACADEMIC SERIES • 2026

EKONOMI POLITIK KETIDAKPASTIAN: DUNIA DI TENGAH KRISIS DAN RIVALITAS

Membaca perubahan dunia melalui ekonomi, kekuasaan, teknologi, energi, konflik, dan ketahanan Indonesia.

ANALISIS GLOBAL • IMPLIKASI INDONESIA • MASA DEPAN



PENULIS

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

OLEH

**Prof Ir Rudy C
Tarumingkeng, PhD**

AI – Data Analyst | IBM-ASMI

www.rudyc.com/cv.pdf

LIMA LINTASAN ANALISIS

KRISIS

RIVALITAS

ENERGI

TEKNOLOGI

KETAHANAN INDONESIA

ARTIKEL EKONOMI POLITIK

Ekonomi Politik Ketidakpastian: Dunia di Tengah Krisis dan Rivalitas

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

AI Data Analyst, IBM-ASMI, Jakarta

IBM-ASMI 2026

Abstrak

Artikel ini menganalisis ketidakpastian sebagai gejala struktural dalam ekonomi politik global, bukan sekadar gangguan sementara yang muncul ketika pasar bergejolak atau konflik pecah. Ketidakpastian kontemporer lahir dari pertemuan beberapa krisis sekaligus: rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perang dan securitization ekonomi, fragmentasi perdagangan, perlombaan teknologi, tekanan iklim, utang publik, serta melemahnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Dalam situasi demikian, pasar tidak berdiri di luar politik. Akses terhadap chip, data, energi, jalur pelayaran, mata uang cadangan, dan mineral kritis menjadi sumber daya strategis yang menentukan kemampuan negara untuk bertahan, memaksa, dan bernegosiasi. Artikel ini menggunakan pendekatan naratif-konseptual dengan menghubungkan literatur ekonomi politik internasional, studi institusi, dan perkembangan kebijakan global sampai 2026. Argumen utama tulisan adalah bahwa ekonomi dunia bergerak menuju bentuk interdependensi yang lebih bersyarat: hubungan lintas batas tetap penting, tetapi semakin disaring oleh pertimbangan keamanan, ketahanan, dan legitimasi domestik. Perbedaan proyeksi pertumbuhan World Bank dan IMF pada 2026 menunjukkan bahwa ketidakpastian bukan hanya soal kurangnya informasi, melainkan juga soal model, kepentingan, dan skenario yang saling bersaing. Bagi Indonesia, kondisi ini membuka ruang diplomasi dan industrialisasi, tetapi sekaligus meningkatkan risiko ketergantungan baru apabila hilirisasi, transformasi digital, dan kebijakan energi tidak ditopang institusi yang akuntabel. Artikel ini menawarkan agenda ketahanan yang menggabungkan diversifikasi ekonomi, penguatan kapasitas

negara, perlindungan sosial adaptif, tata kelola data, diplomasi minilateral, dan investasi pada pengetahuan. Kesimpulannya, tugas politik ekonomi bukan menghapus ketidakpastian, melainkan mengubahnya menjadi risiko yang dapat dibaca, dibagi, dan dikelola secara demokratis.

Kata Kunci: ekonomi politik internasional; ketidakpastian; rivalitas geopolitik; geoeconomics; krisis; ketahanan; Indonesia

Pengantar Penulis

Artikel ini disusun sebagai pembacaan naratif atas perubahan ekonomi politik global pada masa ketika krisis tidak lagi hadir sebagai peristiwa tunggal. Pembahasannya menggabungkan konsep, perkembangan empiris, serta implikasi kebijakan bagi Indonesia. Angka proyeksi yang dikutip diperlakukan sebagai skenario institusional pada waktu publikasi, bukan kepastian tentang masa depan. Karena itu, pembaca dianjurkan menggunakan tulisan ini sebagai kerangka analisis dan bahan dialog kebijakan, bukan sebagai pengganti penilaian sektoral yang lebih rinci. Kerangka tersebut sengaja menghubungkan isu makro dengan pengalaman rumah tangga, organisasi, dan wilayah agar hubungan antara keputusan global dan kehidupan sehari-hari tetap terlihat.

Daftar Isi Ringkas

Bagian	Judul
1	Pendahuluan: Dunia yang Kehilangan Kepastian
2	Ketidakpastian, Risiko, dan Krisis sebagai Kategori Politik
3	Dari Globalisasi ke Geoeconomics
4	Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok
5	Perang, Keamanan, dan Ekonomi Energi
6	Rantai Pasok, Semikonduktor, dan Teknologi Strategis
7	Kecerdasan Buatan, Data, dan Persaingan Kekuasaan
8	Krisis Iklim dan Ketidakpastian Pembangunan
9	Utang, Suku Bunga, dan Penyempitan Ruang Fiskal
10	Fragmentasi Perdagangan dan Sistem Keuangan
11	Global South dan Politik Distribusi Krisis
12	Indonesia: Hilirisasi, Komoditas, dan Kedaulatan Ekonomi
13	Pangan, Kesehatan, dan Mobilitas Manusia
14	Populisme, Ketidakpercayaan, dan Politik Identitas
15	Proyeksi Global dan Masalah Pengetahuan
16	Strategi Ketahanan dan Diplomasi Ekonomi Indonesia
17	Reformasi Institusi, Kepemimpinan, dan Etika Kekuasaan
18	Pendidikan, Riset, dan Masa Depan Pekerjaan

Bagian	Judul
19	Agenda Kebijakan: Mengubah Ketidakpastian Menjadi Risiko yang Dikelola
20	Politik Moneter, Mata Uang, dan Distribusi Beban
21	Kota, Wilayah, dan Geografi Ketidakpastian
22	Keamanan Siber, Informasi, dan Infrastruktur Publik
23	Metodologi Skenario untuk Dunia yang Tidak Linear
24	Skenario Dunia 2030: Empat Kemungkinan Politik Ekonomi
25	Penutup Reflektif: Memilih Cara Menghadapi Masa Depan
26	Perusahaan, Kelas Menengah, dan Kontrak Sosial
27	Kepemimpinan Asia dan Multilateralisme yang Praktis
28	Kesimpulan: Politik yang Mampu Hidup dengan Ketidakpastian

1. Pendahuluan: Dunia yang Kehilangan Kepastian

Pada awal abad ke-21, globalisasi sering dipahami sebagai proses yang akan memperdalam keterhubungan, menurunkan biaya transaksi, dan menjadikan perang antarnegara semakin tidak rasional. Optimisme tersebut tidak sepenuhnya keliru. Perdagangan, investasi, teknologi komunikasi, dan mobilitas manusia memang memperluas jaringan saling ketergantungan. Namun, keterhubungan tidak otomatis menghasilkan kepastian. Jaringan yang memudahkan pertukaran juga dapat menjadi saluran bagi guncangan. Krisis kesehatan mengganggu pelabuhan, konflik mengubah harga energi, sanksi memutus pembayaran, sementara bencana iklim memindahkan beban fiskal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dunia yang saling terhubung ternyata juga dunia yang cepat menularkan kepanikan.

Ketidakpastian yang kini dihadapi masyarakat bukan hanya variasi harga atau siklus bisnis. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara masih mampu menjamin energi, pangan, pekerjaan, keamanan, dan masa depan yang layak; apakah lembaga internasional dapat mengatur persaingan; dan apakah teknologi akan memperluas kebebasan atau mempersempit ruang publik. Pertanyaan tersebut berkelindan dengan pengalaman keseharian. Kenaikan ongkos hidup, perubahan pola kerja, pengurangan subsidi, dan kabar konflik yang hadir melalui gawai menjadikan geopolitik terasa dekat. Ketika ketidakpastian global diterjemahkan menjadi kecemasan rumah tangga, ia berubah menjadi energi politik yang dapat memperkuat solidaritas atau mendorong polarisasi.

Tulisan ini menempatkan ketidakpastian sebagai konsep sentral untuk membaca hubungan antara ekonomi dan kekuasaan. Yang dikaji bukan ramalan tunggal mengenai masa depan, melainkan cara aktor membangun skenario, mengendalikan informasi, memilih risiko yang ditanggung publik, serta mengubah ketergantungan ekonomi menjadi alat tawar. Dengan demikian, ekonomi politik ketidakpastian mencakup tiga lapisan. Lapisan pertama adalah material, seperti energi, pangan, modal, teknologi, dan rantai pasok. Lapisan kedua adalah institusional, yaitu aturan, otoritas, dan kapasitas koordinasi. Lapisan ketiga adalah perseptual, yakni bagaimana masyarakat menilai ancaman, keadilan, dan kredibilitas pemerintah.

Tujuan artikel ini adalah menyusun narasi komprehensif tentang dunia yang berada di antara krisis dan rivalitas, kemudian menarik implikasinya bagi Indonesia. Pembahasan dimulai dari perbedaan antara risiko dan ketidakpastian, lalu bergerak menuju geoeconomics, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, energi, teknologi, iklim, utang, serta fragmentasi perdagangan. Bagian berikutnya menghubungkan persoalan tersebut dengan posisi negara-negara Global South dan pilihan strategis Indonesia. Pada akhirnya, artikel mengusulkan kerangka kebijakan yang menempatkan ketahanan, akuntabilitas, dan pembelajaran institusional sebagai inti dari pengelolaan ketidakpastian.

2. Ketidakpastian, Risiko, dan Krisis sebagai Kategori Politik

Risiko dan ketidakpastian sering digunakan secara bergantian, padahal keduanya memiliki konsekuensi kebijakan yang berbeda. Risiko mengacu pada keadaan ketika kemungkinan hasil dapat diperkirakan, meskipun hasil itu sendiri belum pasti. Perusahaan dapat menghitung peluang gagal bayar, negara dapat menyusun skenario banjir, dan bank sentral dapat menilai rentang inflasi. Ketidakpastian lebih radikal: aktor tidak memiliki daftar kemungkinan yang lengkap, tidak mengetahui probabilitas yang dapat dipercaya, atau menghadapi perubahan aturan permainan. Dalam situasi seperti itu, angka tetap diperlukan, tetapi angka tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran final.

Perbedaan tersebut penting karena pengelolaan risiko cenderung menggunakan instrumen teknis, sementara pengelolaan ketidakpastian menuntut pilihan politik. Asuransi dapat mengompensasi kerugian yang terukur, tetapi tidak otomatis menjawab pertanyaan siapa yang berhak menentukan prioritas ketika anggaran terbatas. Model makroekonomi dapat menghitung dampak kenaikan suku bunga, tetapi tidak dapat sendirian menentukan apakah beban penyesuaian harus dipikul pekerja, konsumen, perusahaan, atau pemegang aset. Ketidakpastian memaksa masyarakat membicarakan distribusi, legitimasi, dan keadilan, bukan hanya efisiensi.

Krisis merupakan momen ketika ketidakpastian menjadi terlihat sekaligus diperebutkan. Dalam krisis, keputusan harus dibuat dengan informasi yang tidak lengkap dan waktu yang sempit. Pemerintah sering memperluas kewenangan, bank sentral mengubah instrumen, dan perusahaan menahan investasi. Langkah darurat dapat menyelamatkan sistem, tetapi juga dapat menciptakan preseden baru. Karena itu, krisis bukan sekadar gangguan eksternal; ia dapat mengubah institusi, memperkuat kelompok tertentu, dan menetapkan arah kebijakan selama bertahun-tahun. Tooze (2018) menunjukkan bahwa krisis keuangan mengubah hubungan antara pasar, negara, dan legitimasi demokratis secara mendalam.

Dimensi politik tampak pula dalam penamaan ancaman. Ketika komponen elektronik disebut infrastruktur keamanan, kebijakan impor berubah menjadi kebijakan strategis. Ketika migrasi diposisikan sebagai krisis, mobilitas manusia menjadi objek pengawasan. Ketika inflasi didefinisikan sebagai akibat perilaku konsumen, solusi akan berbeda dibandingkan ketika penyebabnya dicari pada struktur pasar, gangguan pasokan, atau margin keuntungan. Dengan kata lain, ketidakpastian bukan ruang kosong. Ia dibentuk oleh narasi, indikator, kewenangan, dan kemampuan untuk menentukan masalah yang dianggap mendesak.

3. Dari Globalisasi ke Geoeconomics

Globalisasi tidak berhenti, tetapi logikanya berubah. Pada masa ketika efisiensi menjadi ukuran dominan, perusahaan cenderung menempatkan produksi di lokasi yang paling murah dan mengandalkan jaringan logistik lintas negara. Model tersebut menghasilkan harga lebih rendah dan spesialisasi yang luas, tetapi sekaligus membuat banyak ekonomi rentan terhadap satu titik kegagalan. Pandemi dan perang memperlihatkan bahwa biaya murah dapat berubah menjadi biaya tinggi ketika akses terputus. Sejak itu, istilah *resilience*, *friend-shoring*, *near-shoring*, dan *de-risking* masuk ke dalam bahasa kebijakan publik.

Perubahan tersebut sering disebut *geoeconomics*, yaitu penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik. Tarif, pembatasan ekspor, kontrol investasi, sanksi finansial, bantuan pembangunan, dan kebijakan industri tidak lagi dibaca semata sebagai kebijakan domestik. Instrumen itu menjadi bagian dari persaingan kekuasaan. Farrell dan Newman (2019) menjelaskan bahwa jaringan ekonomi global memiliki titik kendali yang dapat digunakan untuk melakukan *coercion*. Negara yang menguasai pusat pembayaran, teknologi, atau standar dapat memengaruhi aktor yang secara formal berada di luar wilayahnya.

Geoeconomics juga memperluas peran perusahaan. Korporasi teknologi, perusahaan pelayaran, produsen semikonduktor, dan platform digital mengelola infrastruktur yang sebelumnya dianggap urusan negara. Keputusan sebuah perusahaan untuk mematuhi sanksi, mengubah jalur pengiriman, atau membatasi akses terhadap layanan awan dapat menghasilkan konsekuensi strategis. Hubungan antara negara dan perusahaan karena itu tidak hanya berbentuk regulasi satu arah. Pemerintah

membutuhkan kapasitas korporasi, sedangkan korporasi membutuhkan legitimasi dan perlindungan negara.

Namun, de-risking memiliki dilema. Pengurangan ketergantungan yang terlalu luas dapat meningkatkan biaya produksi, mengurangi perdagangan, dan memecah standar. Negara berpendapatan menengah dapat kehilangan investasi jika harus memilih blok secara kaku. Di sisi lain, mempertahankan ketergantungan penuh pada satu pemasok dapat menjadi risiko politik. Pilihan yang rasional bukan memutuskan seluruh hubungan, melainkan membedakan sektor strategis, membangun redundansi, dan menyusun mekanisme konsultasi ketika gangguan terjadi. Dengan pendekatan ini, efisiensi dan keamanan tidak diperlakukan sebagai lawan mutlak, tetapi sebagai sasaran yang harus dinegosiasikan.

4. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan poros paling menentukan dalam ekonomi politik kontemporer. Persaingan tersebut mencakup kekuatan militer, teknologi, perdagangan, mata uang, standar digital, narasi pembangunan, dan akses terhadap bahan mentah. Amerika Serikat masih memiliki keunggulan besar dalam jaringan aliansi, pasar modal, perusahaan teknologi, dan ekosistem inovasi. Tiongkok memiliki skala industri, kapasitas manufaktur, basis konsumen yang besar, serta kemampuan negara untuk mengarahkan investasi jangka panjang. Ketika dua kekuatan tersebut saling membatasi, negara lain tidak hanya menerima dampak ekonomi, tetapi juga menghadapi tekanan untuk memosisikan diri.

Sumber ketegangan bukan satu isu tunggal. Sengketa teknologi mencerminkan persaingan atas kemampuan komputasi, kecerdasan buatan, sensor, dan keamanan data. Perdagangan menjadi arena untuk memperdebatkan subsidi, transfer teknologi, dan ketergantungan industri. Laut dan jalur pelayaran menghubungkan pertimbangan militer dengan arus komoditas. Sementara itu, narasi mengenai tata kelola demokratis, kedaulatan, dan pembangunan menawarkan pilihan normatif yang berbeda. Dalam konteks ini, konflik ekonomi dapat berkembang tanpa perang terbuka, sedangkan ketegangan militer dapat segera memengaruhi premi risiko dan harga komoditas.

Negara-negara menengah berusaha mempertahankan strategic autonomy, tetapi otonomi tidak sama dengan netralitas pasif. Otonomi memerlukan kemampuan untuk berkata ya atau tidak berdasarkan kepentingan sendiri. Ia membutuhkan pasar yang cukup beragam, industri domestik yang kompetitif, diplomasi yang dipercaya, dan institusi yang dapat membaca perubahan. ASEAN, misalnya, menghadapi kebutuhan untuk menjaga sentralitas kawasan sambil merespons persaingan kekuatan besar. Ruang manuver akan lebih besar jika negara-negara Asia Tenggara memperkuat kerja sama internal, bukan sekadar menunggu tawaran dari luar.

Dalam melihat rivalitas tersebut, Indonesia perlu menghindari dua kekeliruan. Pertama, menganggap dunia akan segera terbagi menjadi dua blok tertutup. Kedua, menganggap persaingan hanya masalah jauh yang tidak berpengaruh pada kebijakan nasional. Kenyataannya lebih cair. Rantai pasok dapat melintasi beberapa negara, modal dapat berpindah cepat, dan perusahaan dapat menyesuaikan strategi tanpa mengikuti garis blok secara sempurna. Tantangan Indonesia adalah mengelola keterhubungan secara selektif, memperkuat posisi tawar, dan memastikan bahwa kebijakan luar negeri ekonomi tidak ditentukan oleh kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.

5. Perang, Keamanan, dan Ekonomi Energi

Energi adalah titik temu antara kebutuhan sehari-hari dan strategi kekuasaan. Rumah tangga memerlukan listrik dan bahan bakar, industri memerlukan input yang stabil, sementara negara membutuhkan cadangan dan jalur distribusi yang aman. Konflik di kawasan penghasil energi, gangguan pelayaran, atau perubahan kebijakan ekspor dapat menaikkan harga secara cepat. Dampaknya menyebar melalui inflasi, biaya transportasi, tekanan subsidi, dan penurunan daya beli. World Bank dalam *Global Economic Prospects* Juni 2026 memproyeksikan pertumbuhan global melambat menjadi 2,5 persen pada 2026 dalam skenario ketika konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga energi. Angka tersebut menunjukkan bagaimana peristiwa geopolitik dapat diterjemahkan menjadi proyeksi makroekonomi.

Energi tidak hanya berfungsi sebagai komoditas, tetapi juga sebagai alat diplomasi. Negara pengeksport dapat menggunakan kontrak, kuota, atau pembangunan infrastruktur untuk memperluas pengaruh. Negara pengimpor berusaha membuat cadangan, mendiversifikasi pemasok, dan mempercepat energi terbarukan. Transisi energi sendiri membuka arena persaingan baru karena baterai, kendaraan listrik, panel surya, dan jaringan listrik membutuhkan mineral, teknologi, serta standar baru. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dapat digantikan oleh ketergantungan pada mineral kritis apabila rantai pasok tidak dibangun secara beragam dan bertanggung jawab.

Kebijakan energi sering berada dalam ketegangan antara keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan. Harga yang tinggi menekan konsumen, tetapi subsidi yang terlalu luas membebani anggaran dan dapat mengurangi insentif efisiensi. Pengurangan emisi memerlukan investasi, tetapi biaya transisi tidak boleh dibebankan secara tidak proporsional kepada kelompok miskin dan pekerja di daerah berbasis komoditas. Konsep just transition menjadi penting karena transformasi energi harus menyertakan penciptaan pekerjaan, pelatihan ulang, perlindungan daerah, serta partisipasi masyarakat.

Bagi Indonesia, ketahanan energi berarti lebih dari sekadar memiliki sumber daya alam. Negara perlu mengembangkan kapasitas pengolahan, interkoneksi jaringan, penyimpanan, dan tata kelola permintaan. Kebijakan yang terlalu berorientasi pada ekspor bahan mentah rentan terhadap perubahan harga dan tekanan perdagangan. Sebaliknya, industrialisasi energi yang tidak memperhitungkan lingkungan dapat menghasilkan biaya sosial besar. Pilihan terbaik memerlukan koordinasi lintas kementerian, transparansi kontrak, pengawasan dampak, dan investasi penelitian agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi transisi, tetapi juga ikut membangun kemampuan teknologinya.

6. Rantai Pasok, Semikonduktor, dan Teknologi Strategis

Rantai pasok global memperlihatkan bahwa produksi modern dibangun dari urutan ketergantungan yang panjang. Satu produk dapat dirancang di satu negara, menggunakan perangkat lunak dari negara lain, dibuat dari material yang diproses di wilayah ketiga, dirakit di tempat keempat, dan didistribusikan melalui pelabuhan yang dikelola perusahaan multinasional. Keuntungan dari pembagian kerja tersebut besar, tetapi transparansi sering terbatas. Pemerintah mengetahui posisi strategis industri tertentu, sementara masyarakat jarang mengetahui siapa yang menanggung risiko ketika rantai itu terganggu.

Semikonduktor menjadi contoh paling jelas. Chip menghubungkan pertahanan, otomotif, telekomunikasi, kesehatan, dan kecerdasan buatan. Kapasitas desain, mesin litografi, bahan kimia, fabrikasi, dan pengemasan berada pada lokasi berbeda. Karena itu, kontrol terhadap chip bukan hanya kebijakan perdagangan; ia memengaruhi kemampuan militer, produktivitas industri, dan kedaulatan digital. Pembatasan ekspor dapat melindungi keunggulan teknologi, tetapi juga mendorong pembentukan ekosistem alternatif. Subsidi industri dapat mempercepat investasi, meskipun berisiko menimbulkan perlombaan bantuan negara yang tidak efisien.

Ketahanan rantai pasok tidak berarti setiap negara harus memproduksi semuanya sendiri. Autarki penuh hampir selalu mahal dan tidak realistis. Yang diperlukan adalah pemetaan ketergantungan, persediaan strategis, pemasok alternatif, standar interoperabilitas, dan kesepakatan transparansi. Perusahaan perlu didorong untuk memasukkan skenario gangguan ke dalam perencanaan, sementara negara harus menetapkan sektor yang benar-benar kritis. Kerja sama regional dapat menjadi lapisan penyangga, misalnya melalui pertukaran informasi, harmonisasi prosedur, dan dukungan kepada usaha kecil yang menjadi pemasok.

Indonesia memiliki peluang pada pengolahan mineral, komponen, perakitan, dan layanan digital, tetapi peluang tersebut tidak akan otomatis menjadi kemampuan nasional. Daya saing memerlukan tenaga kerja terampil, listrik andal, perlindungan kekayaan intelektual, kualitas pelabuhan, dan kepastian hukum. Hilirisasi yang hanya memindahkan tahap pengolahan tanpa membangun kemampuan desain akan menyisakan ketergantungan di tingkat yang lebih kompleks. Kebijakan industri perlu memiliki indikator pembelajaran: berapa banyak teknologi yang dikuasai, pemasok domestik yang naik kelas, peneliti yang terserap, dan produk bernilai tambah yang mampu menembus pasar.

7. Kecerdasan Buatan, Data, dan Persaingan Kekuasaan

Kecerdasan buatan mengubah ekonomi politik karena menghubungkan data, komputasi, energi, modal, dan keahlian. Sistem AI yang canggih membutuhkan pusat data, chip, listrik, model, talenta, dan akses ke kumpulan data yang luas. Artinya, kekuasaan tidak hanya berada pada pemilik algoritma, tetapi juga pada aktor yang menguasai infrastruktur. Perusahaan platform dapat memengaruhi distribusi informasi, produktivitas, dan standar kerja. Negara melihat AI sebagai sumber pertumbuhan sekaligus sebagai bagian dari keamanan nasional.

Ketidakpastian teknologi memiliki dua dimensi. Pertama, belum jelas bagaimana produktivitas akan tersebar. Sebagian perusahaan dapat memperoleh keuntungan besar, sementara pekerja menghadapi perubahan tugas, pengawasan, atau penggantian pekerjaan. Kedua, belum pasti bagaimana risiko sosial akan ditangani. Kesalahan sistem, bias, penyalahgunaan data, dan manipulasi informasi dapat mengurangi kepercayaan publik. Respons yang hanya berfokus pada inovasi akan mengabaikan dampak distribusional; respons yang hanya berfokus pada larangan akan mengurangi kesempatan belajar dan beradaptasi.

Tata kelola data harus menyeimbangkan hak individu, kepentingan publik, dan kebutuhan inovasi. Data bukan sekadar bahan mentah yang dapat dipanen tanpa batas. Ia berkaitan dengan identitas, pengalaman, dan relasi sosial. Negara perlu menetapkan aturan penggunaan, audit, keamanan, portabilitas, serta mekanisme keberatan. Di sektor publik, penggunaan AI harus dapat dijelaskan dan ditinjau, terutama ketika menyangkut bantuan sosial, kredit, pendidikan, kesehatan, atau penegakan hukum. Akuntabilitas tidak boleh hilang hanya karena keputusan dibuat dengan bantuan mesin.

Bagi Indonesia, agenda AI seharusnya tidak berhenti pada adopsi aplikasi. Negara perlu membangun kapasitas riset, bahasa dan data lokal, pendidikan numerasi, serta ekosistem usaha yang mampu menggunakan AI untuk produktivitas dan pelayanan publik. Kebijakan pengadaan dapat mendorong teknologi yang aman dan dapat diaudit. Lembaga pendidikan perlu mengajarkan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya cara memakai perangkat lunak. Jika tidak, Indonesia akan menjadi konsumen komputasi yang bergantung pada infrastruktur dan aturan dari luar.

8. Krisis Iklim dan Ketidakpastian Pembangunan

Krisis iklim menghadirkan ketidakpastian dalam skala geografis dan waktu yang luas. Banjir, kekeringan, gelombang panas, kebakaran, serta perubahan pola hujan memengaruhi produktivitas pertanian, kesehatan, infrastruktur, dan harga pangan. Dampaknya tidak merata. Rumah tangga miskin cenderung tinggal di lokasi yang lebih rentan, memiliki tabungan lebih kecil, dan bekerja pada sektor yang kurang terlindungi. Dengan demikian, bencana iklim sekaligus menjadi persoalan distribusi dan keadilan.

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan agregat dapat menutupi akumulasi kerentanan. Jalan dan kawasan industri mungkin meningkatkan output, tetapi jika dibangun tanpa penilaian risiko hidrologis, biaya pemulihan akan menjadi beban publik. Proyek energi terbarukan pun dapat menimbulkan konflik lahan apabila masyarakat lokal tidak memiliki posisi tawar dan mekanisme bagi hasil. Adaptasi bukan sekadar membangun tanggul atau menanam pohon; ia memerlukan tata ruang, sistem peringatan dini, pembiayaan bencana, perlindungan sosial, dan koordinasi antardaerah.

Laporan pembangunan internasional pada 2025 menekankan bahwa konflik, guncangan iklim, dan penyempitan ruang fiskal saling memperkuat. Negara yang menghabiskan anggaran untuk merespons bencana memiliki lebih sedikit ruang untuk pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, rendahnya kualitas layanan publik dapat memperburuk dampak guncangan berikutnya. Lingkaran tersebut menunjukkan perlunya investasi pencegahan yang sering kurang populer secara politik karena manfaatnya baru terlihat ketika bencana tidak terjadi.

Kebijakan iklim juga berhubungan dengan legitimasi. Masyarakat cenderung menerima perubahan perilaku apabila melihat proses yang adil, manfaat yang jelas, dan pembagian beban yang transparan. Pajak karbon, misalnya, perlu disertai kompensasi yang tepat sasaran dan informasi yang dapat dipercaya. Transisi yang dirancang dari atas tanpa dialog dapat memunculkan resistensi. Indonesia membutuhkan kerangka pembangunan yang menggabungkan daya saing dan batas ekologis, dengan indikator yang mengukur kualitas pekerjaan, ketahanan wilayah, emisi, dan kesejahteraan, bukan hanya pertumbuhan produk domestik bruto.

9. Utang, Suku Bunga, dan Penyempitan Ruang Fiskal

Utang publik merupakan alat penting untuk membiayai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan respons terhadap guncangan. Masalah muncul ketika biaya utang meningkat, pendapatan negara melemah, atau proyek yang dibiayai tidak menghasilkan kapasitas ekonomi dan sosial yang diharapkan. Kenaikan suku bunga global dapat mengubah perhitungan secara cepat. Negara dengan mata uang yang lebih lemah menghadapi risiko kenaikan biaya pembayaran, sementara investor meminta premi risiko lebih tinggi ketika stabilitas politik dipertanyakan.

Ruang fiskal tidak hanya ditentukan oleh rasio utang terhadap PDB. Kredibilitas lembaga, struktur jatuh tempo, denominasi mata uang, basis pajak, dan kualitas belanja juga menentukan kemampuan pemerintah. Negara dengan rasio utang yang sama dapat menghadapi risiko berbeda karena perbedaan kepercayaan dan kapasitas mobilisasi pendapatan. Pengelolaan utang karena itu harus dipadukan dengan reformasi pajak, transparansi, dan evaluasi program. Penghematan yang memotong layanan dasar dapat menurunkan legitimasi serta melemahkan kapasitas produktif, sehingga tidak selalu menjadi solusi yang berkelanjutan.

Ketika ruang fiskal menyempit, konflik distribusi menguat. Pemerintah harus memilih antara mempertahankan subsidi, membayar bunga, membangun infrastruktur, dan mendanai perlindungan sosial. Kelompok dengan akses politik yang lebih kuat dapat mempertahankan fasilitas, sementara biaya penyesuaian dibebankan kepada masyarakat luas. Proses penganggaran perlu membuka informasi mengenai penerima manfaat, risiko kontinjensi, dan hasil program. Tanpa pengawasan, kebijakan anti-krisis dapat berubah menjadi transfer kekayaan yang tidak terlihat.

Indonesia memiliki kesempatan memperkuat ketahanan fiskal melalui peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis penerimaan, reformasi belanja, dan pengelolaan risiko bencana. Digitalisasi administrasi dapat membantu, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan kepercayaan. Warga akan lebih bersedia membayar pajak jika melihat hubungan yang masuk akal antara kontribusi dan kualitas layanan. Kebijakan fiskal yang kredibel bukan berarti selalu ketat; ia berarti mampu bergerak countercyclical ketika ekonomi melemah dan menahan ekspansi ketika tekanan meningkat, dengan aturan yang dapat dipahami publik.

10. Fragmentasi Perdagangan dan Sistem Keuangan

Perdagangan internasional masih menjadi sumber pertumbuhan, tetapi sistemnya semakin dipenuhi pengecualian, penyelidikan keamanan, dan standar yang bersaing. Tarif dapat diterapkan untuk melindungi industri, menekan mitra, atau memperoleh konsesi. Subsidi dipakai untuk membangun kapasitas domestik. Regulasi lingkungan dan ketenagakerjaan dapat meningkatkan kualitas produksi, tetapi juga menjadi hambatan bagi negara yang belum mampu memenuhi standar. Dalam kondisi ini, akses pasar bergantung pada kemampuan teknis dan diplomasi, bukan hanya pada harga barang.

Sistem keuangan juga mengalami fragmentasi. Dominasi mata uang cadangan tetap kuat, namun sanksi, pembekuan aset, dan pembatasan pembayaran mendorong sebagian negara mencari mekanisme alternatif. Upaya tersebut tidak serta-merta menggantikan sistem yang ada karena kepercayaan, likuiditas, dan jaringan membutuhkan waktu untuk dibangun. Akan tetapi, perubahan arah dapat meningkatkan biaya transaksi dan memperumit tata kelola. Perusahaan harus mempertimbangkan risiko kepatuhan lintas yurisdiksi, sedangkan negara perlu memastikan bahwa kebijakan finansial tidak mudah dipakai untuk menekan kelompok yang tidak terlibat konflik.

Fragmentasi membatasi manfaat ekonomi skala global. Perusahaan mungkin harus membuat produk berbeda untuk pasar berbeda, menambah persediaan, dan mematuhi banyak sistem sertifikasi. Konsumen dapat menghadapi harga lebih tinggi. Negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas menjadi rentan terhadap perubahan permintaan dan aturan. Di sisi lain, fragmentasi dapat membuka kesempatan bagi pengembangan industri lokal dan diversifikasi pasar. Hasil akhirnya bergantung pada apakah negara menggunakan ruang tersebut untuk meningkatkan kapabilitas atau sekadar mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan lain.

Indonesia memerlukan strategi perdagangan yang lincah. Kemitraan harus dibangun secara luas, tetapi tidak tanpa syarat. Negosiasi perdagangan perlu memperhitungkan transfer pengetahuan, akses bagi usaha kecil, keberlanjutan, dan peluang naik kelas dalam rantai nilai. Diplomat ekonomi, pelaku usaha, peneliti, dan pemerintah daerah perlu terhubung dalam satu sistem informasi. Dengan demikian, perubahan standar dapat diantisipasi dan bukan baru direspons setelah ekspor terhambat.

11. Global South dan Politik Distribusi Krisis

Negara-negara Global South sering menerima dampak krisis yang bukan sepenuhnya mereka ciptakan. Mereka menghadapi biaya utang yang lebih tinggi, ruang fiskal sempit, perubahan harga komoditas, dan konsekuensi iklim yang berat. Ketika negara maju meluncurkan subsidi industri atau proteksi teknologi, perusahaan dari negara berkembang dapat kehilangan peluang. Pada saat yang sama, tuntutan untuk melakukan transisi hijau memerlukan investasi besar yang tidak selalu tersedia. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian global mempunyai dimensi historis: kemampuan menghadapi guncangan dibentuk oleh warisan kolonial, struktur perdagangan, dan ketimpangan akses finansial.

Global South bukan kelompok yang homogen. Negara pengekspor energi memiliki kepentingan berbeda dari negara kepulauan yang rentan kenaikan muka laut. Negara dengan pasar domestik besar memiliki pilihan berbeda dari negara kecil yang bergantung pada pariwisata. Namun, terdapat kepentingan bersama dalam reformasi lembaga keuangan, pembiayaan iklim, transfer teknologi, dan ruang kebijakan industri. Koalisi baru dapat dibangun melalui isu tertentu tanpa harus membentuk blok permanen. Diplomasi yang berhasil akan menggabungkan solidaritas normatif dengan perhitungan kepentingan yang realistis.

Krisis juga membuka persoalan representasi. Keputusan mengenai utang, perdagangan, energi, dan standar teknologi sering dibuat di forum yang tidak mudah diakses publik. Negara berkembang hadir secara formal, tetapi kemampuan negosiasinya dapat terbatas oleh data, keahlian, atau tekanan pasar. Penguatan kapasitas perundingan menjadi investasi penting. Ini mencakup universitas, lembaga riset, aparatur, komunitas bisnis, dan masyarakat sipil. Kedaulatan tidak hanya diukur dari kemampuan menolak tekanan, tetapi juga dari kemampuan memahami pilihan dan konsekuensinya.

Indonesia dapat memainkan peran penghubung antara negara maju, Asia, dan Global South. Posisi tersebut membutuhkan konsistensi. Klaim kepemimpinan akan lebih kuat jika Indonesia memperlihatkan praktik domestik yang mampu menggabungkan pertumbuhan, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Kerja sama Selatan-Selatan dapat diperluas dalam kesehatan, digitalisasi, ketahanan pangan, energi, dan manajemen bencana. Yang diperlukan bukan slogan, melainkan proyek bersama dengan indikator hasil yang dapat diperiksa.

12. Indonesia: Hilirisasi, Komoditas, dan Kedaulatan Ekonomi

Hilirisasi menjadi salah satu jawaban utama Indonesia terhadap posisi rentan sebagai pengekspor komoditas. Dengan mengolah mineral, hasil pertanian, atau sumber daya energi di dalam negeri, nilai tambah diharapkan meningkat, lapangan kerja tercipta, dan basis industri menguat. Kebijakan ini memiliki logika ekonomi yang kuat, tetapi keberhasilan tidak ditentukan oleh larangan ekspor semata. Hilirisasi memerlukan teknologi, pembiayaan, tenaga terampil, energi, infrastruktur, dan pasar. Jika faktor tersebut tidak tersedia, pengolahan dapat berhenti pada tahap awal dan keuntungan terbesar tetap mengalir kepada pemilik modal atau teknologi dari luar.

Kedaulatan ekonomi juga tidak identik dengan kepemilikan negara atas semua aset. Negara dapat berdaulat apabila memiliki kemampuan menetapkan aturan, mengawasi dampak, menegosiasikan kontrak, dan memastikan manfaat tersebar. Perusahaan nasional yang tidak efisien dapat menjadi beban, sedangkan perusahaan asing yang beroperasi dalam kerangka transparan dapat membantu pembelajaran. Perdebatan yang lebih produktif adalah bagaimana membangun kapasitas domestik dan menegosiasikan hubungan yang saling menguntungkan.

Tantangan terbesar berada pada tata kelola. Konsesi, izin, dan proyek strategis menciptakan peluang rente. Ketika informasi kontrak terbatas, masyarakat sulit menilai apakah penerimaan negara sebanding dengan kerusakan lingkungan atau biaya sosial. Korupsi dapat mengubah kebijakan industri menjadi distribusi fasilitas kepada kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan. Karena itu, audit, keterbukaan beneficial ownership, konsultasi publik, dan evaluasi berbasis kinerja harus menjadi bagian dari desain hilirisasi, bukan tambahan administratif.

Indonesia juga perlu menghindari jebakan komoditas versi baru. Permintaan global terhadap nikel, bauksit, dan mineral lain dapat naik, tetapi teknologi dapat berubah dan harga dapat turun. Diversifikasi di tingkat produk, pasar, dan pengetahuan perlu dilakukan sejak awal. Investasi dalam riset material, daur ulang, desain produk, dan pengelolaan limbah akan menentukan apakah Indonesia mampu bertahan ketika struktur permintaan bergeser. Ketahanan berarti memiliki pilihan, bukan hanya memiliki satu komoditas yang sedang populer.

13. Pangan, Kesehatan, dan Mobilitas Manusia

Pangan dan kesehatan adalah sektor tempat ketidakpastian global terasa paling langsung. Gangguan pupuk, cuaca ekstrem, konflik, atau pembatasan ekspor dapat memengaruhi ketersediaan dan harga pangan. Sistem kesehatan menghadapi ancaman penyakit baru, kekurangan tenaga, ketimpangan akses, dan biaya teknologi. Krisis menunjukkan bahwa efisiensi persediaan yang terlalu ketat dapat menjadi kelemahan. Namun, penimbunan tanpa tata kelola juga mahal. Keseimbangan membutuhkan informasi produksi, cadangan yang dikelola baik, dan kerja sama antarwilayah.

Kebijakan pangan seharusnya tidak hanya mengejar swasembada komoditas tertentu. Yang lebih penting adalah ketahanan gizi, keragaman produksi, akses rumah tangga, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Perlindungan petani harus dirancang agar tidak mematikan inovasi atau membebani konsumen. Infrastruktur penyimpanan, pasar lokal, asuransi pertanian, dan data cuaca dapat mengurangi volatilitas. Negara perlu membangun hubungan yang adil antara petani, pelaku distribusi, industri pengolahan, dan konsumen.

Kesehatan publik memperlihatkan pentingnya kapasitas negara sekaligus kepercayaan sosial. Sistem yang kuat membutuhkan surveilans, laboratorium, rantai pasok obat, tenaga kesehatan, dan komunikasi risiko. Informasi yang terlambat atau berubah tanpa penjelasan dapat memicu rumor. Sebaliknya, keterbukaan yang disertai penjelasan ketidakpastian dapat meningkatkan kepatuhan. Kebijakan kesehatan harus mengakui bahwa masyarakat bukan sekadar penerima instruksi, melainkan mitra dalam pengendalian risiko.

Mobilitas manusia menambah lapisan politik. Perubahan iklim, konflik, dan kesenjangan pekerjaan mendorong migrasi. Pekerja migran memberi kontribusi penting bagi ekonomi, tetapi sering menghadapi perlindungan hukum yang lemah. Kebijakan yang hanya melihat migrasi sebagai ancaman akan mengabaikan manfaat dan akar masalah. Indonesia perlu memperkuat perlindungan warga di luar negeri, memperbaiki tata kelola perbatasan, serta membangun jalur mobilitas yang

aman dan teratur. Pendekatan berbasis hak juga membantu mencegah eksploitasi dan perdagangan manusia.

14. Populisme, Ketidakpercayaan, dan Politik Identitas

Ketidakpastian ekonomi mudah menjadi bahan bakar populisme. Ketika upah stagnan, harga meningkat, dan pekerjaan terasa rapuh, masyarakat mencari penjelasan yang sederhana. Politisi dapat menunjuk elite, imigran, perusahaan asing, atau kelompok identitas sebagai penyebab. Narasi tersebut menarik karena memberi arah emosional, meskipun sering tidak menjelaskan hubungan sebab akibat yang kompleks. Rodrik (2018) menunjukkan bahwa tekanan globalisasi dan kelemahan institusi domestik dapat menciptakan kondisi bagi populisme. Persoalannya bukan keberadaan keluhan, melainkan bagaimana keluhan diterjemahkan menjadi kebijakan.

Ketidakpercayaan juga tumbuh ketika pemerintah meminta pengorbanan tanpa membuktikan keadilan. Masyarakat dapat menerima penyesuaian harga atau pajak apabila melihat pejabat, perusahaan besar, dan kelompok kaya ikut menanggung beban. Jika tidak, kebijakan dianggap sebagai pemindahan biaya dari yang kuat kepada yang lemah. Transparansi fiskal, penegakan hukum yang konsisten, dan pelayanan yang dapat diakses merupakan sumber kepercayaan yang lebih efektif daripada kampanye komunikasi semata.

Politik identitas menjadi kuat ketika kanal ekonomi dan institusi tidak mampu menampung ketegangan. Perbedaan etnis, agama, wilayah, atau generasi dapat dipakai untuk mengorganisasi dukungan. Identitas bukan sesuatu yang harus dihapus dari politik, tetapi ia perlu ditempatkan dalam kerangka kewargaan yang setara. Negara harus mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa kompetisi politik tidak berubah menjadi pembenaran kekerasan. Media dan platform digital memikul tanggung jawab tambahan karena algoritma dapat memperkuat konten yang memancing kemarahan.

Demokrasi yang sehat tidak menghilangkan konflik; ia mengelolanya melalui aturan, representasi, dan koreksi. Di tengah ketidakpastian, lembaga perlu menyediakan ruang bagi perbedaan pandangan dan kapasitas untuk memperbaiki kebijakan. Pemerintah dapat membangun legitimasi dengan menjelaskan trade-off, mengakui kesalahan, dan menunjukkan indikator hasil. Warga tidak membutuhkan janji bahwa semua masalah akan segera selesai. Mereka membutuhkan alasan untuk percaya bahwa keputusan dibuat secara masuk akal dan mereka memiliki kesempatan memengaruhinya.

15. Proyeksi Global dan Masalah Pengetahuan

Proyeksi ekonomi merupakan perangkat penting untuk mengambil keputusan, tetapi proyeksi tidak pernah bebas dari asumsi. IMF dalam World Economic Outlook Juli 2026 memperkirakan pertumbuhan global sekitar 3,3 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027 dalam kerangka analisis yang menekankan persilangan perang dan teknologi. World Bank pada publikasi Juni 2026 menampilkan proyeksi yang lebih rendah, sekitar 2,5 persen untuk 2026, dengan penekanan pada tekanan energi dan konflik. Perbedaan ini tidak perlu dibaca sebagai kesalahan salah satu lembaga. Ia menunjukkan bahwa pilihan skenario, waktu publikasi, cakupan negara, dan penilaian terhadap risiko menghasilkan gambaran yang berbeda.

Pembuat kebijakan sering tergoda menggunakan satu angka sebagai jangkar kepastian. Padahal, angka tersebut seharusnya menjadi titik awal dialog mengenai sensitivitas. Apa yang terjadi jika harga

energi naik lebih lama? Bagaimana jika suku bunga bertahan tinggi? Seberapa besar dampak gangguan pelayaran? Apakah konsumsi domestik mampu menahan ekspor yang melemah? Pendekatan berbasis rentang dan skenario membantu pemerintah menyiapkan respons yang dapat diaktifkan sesuai perkembangan, bukan menunggu satu ramalan terbukti.

Masalah pengetahuan juga muncul karena data tidak selalu netral atau lengkap. Ekonomi informal, kerusakan ekologis, kerja perawatan, dan distribusi pendapatan sering kurang terlihat dalam indikator agregat. Penggunaan data real-time dapat mempercepat respons, tetapi juga berisiko memperkuat bias jika sumbernya tidak representatif. Data perlu dipadukan dengan pengetahuan lokal, konsultasi, dan evaluasi lapangan. Kapasitas statistik merupakan bagian dari kedaulatan karena negara yang tidak mampu mengukur kondisi sendiri akan mudah bergantung pada narasi pihak lain.

Indonesia perlu memperkuat fungsi horizon scanning di dalam pemerintahan. Unit analisis harus memantau perubahan teknologi, regulasi perdagangan, iklim, demografi, dan sentimen publik. Hasilnya tidak cukup berupa laporan, tetapi harus terhubung dengan proses anggaran, kebijakan industri, dan latihan krisis. Pemerintah dapat menggunakan dashboard risiko, tetapi dashboard yang baik harus menjelaskan sumber, kualitas, dan batas data. Tujuannya bukan membangun ilusi kontrol, melainkan meningkatkan kecepatan belajar.

16. Strategi Ketahanan dan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Ketahanan nasional dalam ekonomi politik tidak berarti menutup diri. Ketahanan berarti kemampuan mempertahankan fungsi penting, pulih setelah gangguan, dan beradaptasi ketika kondisi berubah. Ia dibangun melalui diversifikasi pemasok, cadangan, kapasitas domestik, hubungan diplomatik, perlindungan sosial, dan kemampuan memperbaiki kesalahan. Negara yang memiliki banyak koneksi tetapi tidak memiliki pilihan akan tetap rentan. Sebaliknya, negara yang memiliki pilihan namun tidak mampu berkoordinasi akan lambat merespons.

Diplomasi ekonomi Indonesia perlu bergerak pada beberapa tingkat. Pada tingkat bilateral, hubungan dengan kekuatan besar harus diarahkan pada investasi, transfer pengetahuan, akses pasar, dan perlindungan warga. Pada tingkat regional, ASEAN dapat memperkuat konektivitas, ketahanan pangan, energi, serta standar digital. Pada tingkat multilateral, Indonesia perlu mendorong reformasi pembiayaan pembangunan dan aturan yang memberi ruang bagi negara berkembang. Strategi berlapis mengurangi risiko bahwa satu forum atau satu mitra menjadi terlalu menentukan.

Investasi asing tetap penting, tetapi kualitas dan syaratnya harus diperiksa. Evaluasi tidak hanya melihat nilai modal, melainkan juga pekerjaan yang tercipta, keterkaitan dengan pemasok lokal, pelatihan, dampak lingkungan, dan kontribusi pajak. Perjanjian investasi harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang seimbang dan tidak menghilangkan ruang regulasi publik. Pusat promosi investasi perlu bekerja bersama lembaga pendidikan dan pemerintah daerah agar proyek tidak berdiri sebagai enclave yang terpisah dari ekonomi lokal.

Perlindungan sosial merupakan infrastruktur ketahanan. Transfer yang tepat waktu dapat mencegah rumah tangga menjual aset produktif ketika harga naik atau pekerjaan hilang. Program harus adaptif sehingga dapat diperluas saat bencana dan dikurangi secara bertahap ketika kondisi membaik. Data penerima perlu diperbarui dan dilindungi. Kebijakan ketahanan yang hanya membiayai pelabuhan atau cadangan energi tanpa melindungi manusia akan menghasilkan sistem yang kuat di atas kertas tetapi rapuh secara sosial.

17. Reformasi Institusi, Kepemimpinan, dan Etika Kekuasaan

Institusi yang baik mengurangi ketidakpastian bukan dengan menjanjikan hasil tertentu, melainkan dengan menyediakan prosedur yang dapat dipercaya. Aturan harus cukup stabil untuk memungkinkan perencanaan, tetapi cukup lentur untuk menghadapi perubahan. Hall dan Taylor (1996) memperlihatkan bahwa institusi membentuk perilaku melalui aturan formal, norma, dan cara aktor menafsirkan kepentingan. Dalam konteks Indonesia, reformasi institusi perlu memperhatikan praktik informal, jaringan patronase, dan kesenjangan antara kebijakan tertulis dan implementasi.

Kepemimpinan dalam masa krisis memerlukan kemampuan menjelaskan pilihan yang sulit. Pemerintah mungkin harus memilih antara kecepatan dan konsultasi, kerahasiaan terbatas dan keterbukaan, atau bantuan universal dan bantuan tertarget. Tidak ada formula yang selalu benar. Yang penting adalah kewenangan dibatasi oleh hukum, keputusan dicatat, dan evaluasi dilakukan setelah keadaan darurat. Kekuasaan ekstraordinari tanpa mekanisme pengembalian dapat mengubah krisis menjadi alasan permanen untuk mengurangi pengawasan.

Etika kekuasaan menjadi semakin penting ketika negara menggunakan data, subsidi, dan kebijakan industri untuk merespons ketidakpastian. Pejabat perlu mengelola konflik kepentingan, mengungkapkan kepemilikan, dan menolak penggunaan informasi publik untuk keuntungan privat. Korporasi juga harus bertanggung jawab atas dampak sosial, bukan hanya mengejar kepatuhan minimum. Prinsip *due process*, keterbukaan, dan perlindungan pelapor membantu menciptakan ruang koreksi sebelum masalah berkembang menjadi skandal atau krisis legitimasi.

Reformasi tidak akan berjalan jika hanya menjadi proyek administratif. Ia harus memperkuat kemampuan warga untuk mengawasi, menyampaikan keluhan, dan memperoleh pemulihan. Parlemen, media, universitas, organisasi profesi, dan masyarakat sipil berperan dalam menerjemahkan data menjadi pertanyaan publik. Negara yang demokratis bukan negara yang tidak pernah salah, melainkan negara yang memungkinkan kesalahan diketahui dan diperbaiki tanpa menunggu keruntuhan.

18. Pendidikan, Riset, dan Masa Depan Pekerjaan

Ketidakpastian menuntut sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan faktual, tetapi juga kemampuan belajar ulang. Perubahan teknologi membuat sebagian keterampilan cepat usang. Pekerja membutuhkan kemampuan analisis, komunikasi, kolaborasi lintas disiplin, dan literasi data. Pendidikan tinggi perlu menghubungkan ilmu teknik, sosial, ekonomi, dan etika karena masalah energi atau AI tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang saja.

Riset nasional harus berorientasi pada pembelajaran strategis. Prioritas tidak berarti menutup kebebasan akademik, melainkan menyediakan pembiayaan untuk bidang yang relevan dengan kebutuhan publik: energi bersih, pangan, kesehatan, material, keamanan siber, kebijakan sosial, dan tata kelola. Pemerintah perlu memperbaiki jalur dari laboratorium ke industri, tetapi tidak boleh menilai semua riset hanya dari paten atau komersialisasi jangka pendek. Pengetahuan dasar sering menjadi fondasi bagi inovasi yang belum terlihat manfaatnya.

Masa depan pekerjaan juga memerlukan kebijakan transisi. Pelatihan singkat tanpa hubungan dengan permintaan industri sering menghasilkan sertifikat tanpa pekerjaan. Program harus dirancang bersama perusahaan, serikat pekerja, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Perlindungan pengangguran, layanan penempatan, dan dukungan kewirausahaan perlu disesuaikan dengan pola

kerja baru. Pekerja informal tidak boleh hilang dari rancangan karena mereka menanggung ketidakpastian paling besar.

IBM-ASMI sebagai ruang yang menghubungkan analitik data, manajemen, dan pendidikan dapat menjadi bagian dari ekosistem adaptasi tersebut. Analitik harus dipakai untuk membaca pola, tetapi keputusan tetap memerlukan pertimbangan institusional dan etis. Pendidikan yang baik menyiapkan pemimpin yang mampu menggabungkan bukti, imajinasi, dan tanggung jawab. Dalam dunia yang tidak pasti, kualitas manusia tidak ditentukan oleh kemampuan menebak masa depan secara tepat, melainkan oleh kemampuan membangun pilihan ketika masa depan berubah.

19. Agenda Kebijakan: Mengubah Ketidakpastian Menjadi Risiko yang Dikelola

Agenda pertama adalah membangun arsitektur risiko nasional yang lintas sektor. Pemerintah perlu mengidentifikasi ketergantungan kritis pada energi, pangan, chip, obat, data, dan pembiayaan. Pemetaan harus diperbarui karena rantai pasok bergerak. Setiap sektor memerlukan indikator peringatan dini, skenario gangguan, serta pembagian tanggung jawab antara pusat, daerah, dan pelaku usaha. Latihan krisis perlu dilakukan secara berkala agar koordinasi tidak baru dipelajari ketika bencana terjadi.

Agenda kedua adalah memperkuat diversifikasi tanpa menutup perdagangan. Indonesia perlu memperluas pasar ekspor, pemasok teknologi, sumber energi, dan kanal pembiayaan. Diversifikasi harus disertai peningkatan produktivitas, karena sekadar menggandakan hubungan lama tidak mengurangi risiko. Pemerintah dapat menggunakan pengadaan publik, pembiayaan pembangunan, dan standar untuk menciptakan permintaan awal bagi inovasi lokal. Namun, dukungan harus memiliki batas waktu dan evaluasi supaya tidak menjadi rente permanen.

Agenda ketiga adalah menjadikan perlindungan sosial dan layanan dasar sebagai stabilisator ekonomi. Ketika rumah tangga memiliki akses kesehatan, pendidikan, pangan, dan bantuan sementara, guncangan global tidak langsung berubah menjadi krisis politik. Sistem bantuan perlu inklusif sekaligus akurat. Penggunaan data harus melindungi privasi dan menyediakan mekanisme koreksi bagi warga yang salah terklasifikasi. Ketahanan sosial mengurangi insentif bagi politik ketakutan.

Agenda keempat adalah memperluas partisipasi dalam kebijakan strategis. Dialog publik tidak boleh hanya dilakukan setelah proyek diputuskan. Masyarakat lokal, pekerja, akademisi, dan pelaku usaha harus dilibatkan sejak penetapan masalah. Partisipasi yang bermakna memerlukan informasi yang mudah dipahami dan waktu yang cukup untuk merespons. Proses tersebut memang lebih lambat pada tahap awal, tetapi dapat mengurangi konflik dan biaya penundaan di kemudian hari.

Agenda kelima adalah memperkuat kemampuan membedakan informasi, opini, dan propaganda. Literasi media, transparansi data, serta jurnalisme investigatif merupakan bagian dari keamanan nasional. Masyarakat yang mudah dibanjiri disinformasi akan sulit menyusun respons kolektif. Platform digital perlu bertanggung jawab atas desain dan insentif yang mendorong penyebaran konten berbahaya. Negara harus berhati-hati agar perang melawan disinformasi tidak berubah menjadi pembatasan kritik yang sah.

20. Politik Moneter, Mata Uang, dan Distribusi Beban

Kebijakan moneter sering dipresentasikan sebagai wilayah teknis yang terpisah dari politik. Bank sentral menetapkan suku bunga berdasarkan inflasi, ekspektasi, stabilitas keuangan, dan kondisi pasar tenaga kerja. Namun, keputusan tersebut memiliki konsekuensi distribusional. Suku bunga yang lebih tinggi dapat menekan harga aset dan mengendalikan permintaan, tetapi sekaligus meningkatkan cicilan rumah tangga, biaya modal usaha kecil, dan beban pembayaran utang pemerintah. Suku bunga rendah dapat mendorong investasi, tetapi juga memperluas spekulasi jika regulasi tidak memadai. Setiap pilihan menciptakan pemenang dan pihak yang harus menyesuaikan diri.

Keterbukaan finansial membuat kebijakan nasional berhubungan dengan ekspektasi global. Investor memantau perbedaan suku bunga, risiko fiskal, stabilitas politik, dan arah kebijakan negara besar. Arus modal dapat masuk ketika prospek membaik lalu berbalik ketika sentimen berubah. Perubahan tersebut memengaruhi nilai tukar dan harga impor. Negara dengan pasar domestik kuat memiliki bantalan lebih besar, tetapi tidak sepenuhnya terlindungi. Karena itu, kebijakan makroprudensial, cadangan devisa, dan komunikasi bank sentral menjadi bagian dari strategi ketahanan.

Nilai tukar memiliki peran ganda. Depresiasi dapat membantu daya saing ekspor, tetapi menaikkan biaya bahan baku dan barang modal yang diimpor. Apresiasi dapat mengurangi inflasi impor, tetapi menekan penerimaan eksportir. Perdebatan yang sehat perlu melihat struktur produksi, bukan hanya mengejar angka tertentu. Industri yang mengandalkan impor tinggi membutuhkan strategi substitusi yang realistis, sedangkan eksportir perlu meningkatkan kandungan teknologi agar tidak hanya mengandalkan perubahan harga relatif.

Kredibilitas moneter dibangun oleh konsistensi, independensi yang bertanggung jawab, dan koordinasi yang jelas dengan kebijakan fiskal. Independensi tidak berarti bank sentral bebas dari akuntabilitas. Publik berhak memahami sasaran, risiko, dan batas instrumen. Pemerintah juga harus menghindari tekanan politik jangka pendek yang merusak kepercayaan. Dalam situasi luar biasa, koordinasi dapat diperlukan, tetapi pembagian mandat dan jalur pengawasan harus dinyatakan secara terbuka.

Bagi Indonesia, tantangan moneter akan semakin kompleks ketika transisi energi, digitalisasi pembayaran, dan fragmentasi keuangan global berlangsung bersamaan. Sistem pembayaran yang efisien dapat menurunkan biaya, tetapi juga memerlukan keamanan dan perlindungan konsumen. Rupiah digital atau inovasi finansial lainnya harus dinilai dari manfaat publik, bukan sekadar kebaruan teknologi. Stabilitas merupakan hasil dari institusi, bukan hanya hasil dari satu keputusan suku bunga.

21. Kota, Wilayah, dan Geografi Ketidakpastian

Ketidakpastian global tidak dialami dengan cara yang sama di setiap wilayah. Kota pelabuhan dapat memperoleh manfaat dari perdagangan sekaligus menanggung risiko gangguan logistik dan kenaikan muka laut. Kawasan industri dapat menciptakan pekerjaan, tetapi rentan terhadap perubahan teknologi dan relokasi produksi. Wilayah agraris menghadapi cuaca, harga komoditas, serta keterbatasan akses pasar. Pusat pemerintahan memiliki layanan lebih baik dibandingkan daerah terpencil, sehingga kapasitas menghadapi krisis tidak terdistribusi secara merata.

Perencanaan pembangunan yang terlalu terpusat sering gagal membaca variasi tersebut. Indikator nasional dapat menunjukkan pertumbuhan, sementara sebagian daerah mengalami kehilangan pekerjaan atau kerusakan ekologis. Otonomi daerah membuka ruang eksperimen, tetapi juga berisiko menghasilkan perbedaan kualitas layanan dan kompetisi perizinan. Hubungan pusat-daerah perlu dibangun sebagai sistem pembelajaran: pemerintah pusat memberi standar dan dukungan, daerah mengembangkan solusi yang sesuai konteks, lalu hasilnya dibagikan kepada wilayah lain.

Kota-kota besar menjadi laboratorium penting bagi ekonomi politik ketidakpastian. Kepadatan penduduk memperbesar produktivitas dan inovasi, tetapi juga meningkatkan risiko kemacetan, banjir, polusi, dan ketimpangan perumahan. Pekerja sektor informal membuat ekonomi kota fleksibel, sekaligus membuat banyak keluarga tidak memiliki jaring pengaman. Kebijakan transportasi, hunian, dan ruang publik karena itu bukan sekadar urusan tata kota; ia berhubungan langsung dengan produktivitas dan legitimasi pemerintahan.

Wilayah sumber daya menghadapi dilema lain. Pendapatan dari tambang atau perkebunan dapat membiayai layanan publik, tetapi ketergantungan pada satu komoditas membuat daerah sensitif terhadap perubahan harga. Pekerjaan yang diciptakan sering tidak sebanding dengan dampak terhadap tanah, air, dan kesehatan. Dana bagi hasil perlu dikelola untuk membangun kapasitas jangka panjang, bukan hanya membiayai belanja rutin. Diversifikasi ekonomi lokal harus direncanakan ketika penerimaan komoditas masih tersedia.

Keadilan wilayah menuntut lebih dari alokasi anggaran. Ia membutuhkan konektivitas digital, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan akses ke pembiayaan. Pemerintah dapat menggunakan data spasial untuk memprioritaskan investasi, tetapi data harus dilengkapi konsultasi karena kerentanan sosial tidak selalu tampak pada peta. Pendekatan wilayah membuat kebijakan ketahanan lebih konkret: bukan sekadar menyatakan bahwa masyarakat harus adaptif, tetapi menyediakan sarana agar adaptasi itu mungkin dilakukan.

22. Keamanan Siber, Informasi, dan Infrastruktur Publik

Ketergantungan pada sistem digital membuat keamanan siber menjadi bagian dari ekonomi politik. Serangan terhadap bank, rumah sakit, pelabuhan, jaringan listrik, atau layanan pemerintah dapat menghentikan aktivitas tanpa satu tembakan pun. Kerugian tidak hanya berupa biaya pemulihan, tetapi juga hilangnya kepercayaan. Perusahaan yang mengalami kebocoran data mungkin menghadapi tuntutan dan kehilangan pelanggan, sementara lembaga publik dapat kehilangan legitimasi karena warga mempertanyakan kemampuan negara menjaga informasi mereka.

Keamanan siber memiliki karakter lintas batas. Infrastruktur dapat dimiliki perusahaan dari satu negara, menggunakan perangkat lunak dari negara lain, dan melayani pengguna di wilayah ketiga. Atribusi serangan sering sulit, sedangkan respons harus cepat. Kerja sama internasional diperlukan untuk berbagi indikator ancaman, menetapkan protokol, dan mencegah eskalasi. Namun, kerja sama harus memperhatikan privasi dan kedaulatan agar pertukaran informasi tidak berubah menjadi pengawasan tanpa batas.

Informasi publik juga menjadi medan persaingan. Disinformasi dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemilu, vaksin, kebijakan ekonomi, atau proses hukum. Bot dan konten sintetis mempercepat produksi narasi yang tampak meyakinkan. Respons yang efektif tidak cukup dengan menghapus konten. Negara dan platform perlu memperkuat provenance, pelabelan, pendidikan

literasi, serta akses terhadap informasi resmi yang mudah dipahami. Jurnalisme dan lembaga akademik memerlukan dukungan agar mampu memeriksa klaim secara independen.

Infrastruktur digital seharusnya dirancang dengan prinsip *security by design*. Pengadaan publik perlu memperhitungkan pembaruan keamanan, interoperabilitas, cadangan, dan kemampuan audit. Sistem yang murah pada tahap awal dapat menjadi mahal jika tidak dapat dipulihkan ketika diserang. Pemerintah juga perlu mengembangkan tenaga ahli melalui pendidikan dan jalur karier yang menarik. Tanpa SDM, aturan keamanan hanya menjadi dokumen formal.

Indonesia harus membangun keseimbangan antara pengamanan dan keterbukaan. Regulasi yang terlalu longgar memudahkan eksploitasi, tetapi regulasi yang terlalu luas dapat membatasi inovasi dan kebebasan berekspresi. Mekanisme pengawasan independen, standar minimal, dan pembagian tanggung jawab akan membantu. Ketahanan digital pada akhirnya adalah persoalan sosial: warga, sekolah, perusahaan, dan pemerintah perlu memahami bahwa perlindungan sistem merupakan tanggung jawab bersama.

23. Metodologi Skenario untuk Dunia yang Tidak Linear

Ketika perubahan berlangsung secara linear, perencanaan dapat mengandalkan tren masa lalu. Ketika terjadi titik balik, tren tersebut tidak cukup. Metodologi skenario membantu organisasi membayangkan beberapa masa depan yang masuk akal tanpa mengklaim bahwa salah satunya pasti terjadi. Skenario bukan ramalan; ia adalah alat untuk menguji asumsi, menemukan kerentanan, dan menyiapkan pilihan. Dalam ekonomi politik, skenario juga membantu memperlihatkan bahwa keputusan aktor lain dapat mengubah hasil domestik.

Langkah awal adalah mengidentifikasi pendorong perubahan. Untuk Indonesia, pendorong dapat mencakup konflik geopolitik, harga energi, kebijakan teknologi, pertumbuhan Asia, iklim, demografi, dan kualitas institusi. Pendorong kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kepastian dan dampaknya. Dua ketidakpastian kritis dapat dipakai sebagai sumbu, misalnya keterbukaan perdagangan dan stabilitas geopolitik. Dari sana, organisasi menyusun beberapa dunia yang berbeda dan menguji strategi terhadap masing-masing dunia.

Skenario yang baik harus memiliki logika sebab akibat. Jika konflik meningkat dan perdagangan terfragmentasi, apa yang terjadi pada harga input, investasi, dan pekerjaan? Jika teknologi tersebar cepat tetapi regulasi lemah, siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko? Pertanyaan semacam ini memaksa perencana untuk menghubungkan variabel, bukan menumpuk daftar ancaman. Setiap skenario juga perlu tanda awal yang dapat dipantau sehingga strategi bisa disesuaikan.

Keterbatasan skenario harus diakui. Ia dapat memperkuat bias penyusunnya, mengabaikan kejutan yang belum terpikirkan, atau memberikan rasa percaya diri palsu. Karena itu, prosesnya perlu melibatkan perspektif yang beragam: ekonom, ahli teknologi, pemerintah daerah, pelaku usaha, pekerja, dan komunitas terdampak. Skenario menjadi lebih berguna ketika digunakan sebagai percakapan terstruktur, bukan sebagai dokumen rahasia yang hanya dibaca oleh pimpinan.

Pemerintahan Indonesia dapat menggunakan skenario dalam perencanaan pembangunan, anggaran, dan diplomasi. Setiap program besar sebaiknya memiliki asumsi yang dinyatakan, risiko yang dipantau, serta opsi penyesuaian. Dengan begitu, kebijakan tidak terjebak pada target yang ditetapkan sebelum lingkungan berubah. Perencanaan yang adaptif memberi ruang untuk belajar

tanpa mengorbankan akuntabilitas. Setiap perubahan arah tetap harus dijelaskan kepada publik, termasuk alasan mengapa asumsi lama tidak lagi memadai.

24. Skenario Dunia 2030: Empat Kemungkinan Politik Ekonomi

Skenario pertama dapat disebut interdependensi terkelola. Rivalitas kekuatan besar tetap berlangsung, tetapi jalur komunikasi dan aturan krisis berfungsi. Negara melakukan de-risking secara selektif, sementara perdagangan sektor nonstrategis tetap terbuka. Energi terbarukan tumbuh, namun transisi berlangsung bertahap. Dalam dunia ini, Indonesia memperoleh manfaat jika mampu memasok mineral dan produk olahan dengan standar lingkungan yang kredibel. Keunggulan ditentukan oleh kualitas institusi dan kemampuan memenuhi aturan yang beragam.

Skenario kedua adalah blok-blok bersaing. Pembatasan teknologi dan sanksi meluas, perusahaan harus memilih ekosistem, dan standar digital terpecah. Negara menambah subsidi untuk industri strategis. Biaya produksi meningkat, tetapi investasi pada kapasitas domestik juga tumbuh. Indonesia menghadapi tekanan untuk memilih posisi. Strategi yang paling aman adalah memperkuat pasar regional, mempertahankan hubungan dengan berbagai pihak, dan mengembangkan kapasitas untuk memproduksi komponen yang benar-benar kritis.

Skenario ketiga adalah krisis berulang. Konflik regional, bencana iklim, dan gangguan logistik datang berdekatan. Pemerintah menghabiskan banyak anggaran untuk respons, sementara investasi jangka panjang tertunda. Masyarakat mengalami kelelahan dan kepercayaan menurun. Dalam dunia ini, perlindungan sosial, cadangan pangan, dan sistem kesehatan menjadi lebih penting daripada proyek simbolik. Pemerintah daerah yang memiliki rencana kontinjensi dan jejaring komunitas akan lebih mampu bertahan.

Skenario keempat adalah percepatan teknologi yang tidak merata. AI meningkatkan produktivitas sektor tertentu, tetapi banyak pekerja tidak memperoleh akses terhadap pelatihan dan manfaat. Platform besar menguasai data dan infrastruktur, sementara negara berjuang mengejar regulasi. Ketimpangan dapat mendorong populisme baru. Respons Indonesia perlu memadukan kebijakan inovasi dengan pembagian manfaat, termasuk pendidikan sepanjang hayat, dukungan usaha kecil, dan perlindungan data.

Keempat skenario itu bukan prediksi dan dapat muncul secara bersamaan dalam sektor berbeda. Nilainya terletak pada pertanyaan yang ditimbulkan. Kapasitas apa yang berguna di semua dunia tersebut? Jawabannya adalah institusi yang dipercaya, tenaga terampil, keuangan publik yang sehat, diplomasi yang luwes, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan jaringan sosial yang kuat. Investasi pada kemampuan tersebut merupakan bentuk asuransi strategis yang manfaatnya tidak bergantung pada satu ramalan.

25. Penutup Reflektif: Memilih Cara Menghadapi Masa Depan

Perdebatan mengenai masa depan sering terjebak pada pilihan palsu: terbuka atau tertutup, pasar atau negara, pertumbuhan atau lingkungan, teknologi atau manusia. Ketidakpastian justru menunjukkan bahwa pilihan tersebut saling terkait. Pasar membutuhkan institusi untuk mengurangi biaya transaksi, negara membutuhkan informasi dari pasar, dan masyarakat membutuhkan keduanya untuk memperoleh pekerjaan serta layanan. Pertumbuhan yang mengabaikan lingkungan akan

menurunkan kapasitas produksi, sedangkan kebijakan lingkungan yang tidak memperhatikan kesejahteraan dapat kehilangan dukungan.

Kepemimpinan politik di tengah rivalitas harus bersifat transaksional sekaligus normatif. Transaksional berarti mampu menegosiasikan kepentingan secara pragmatis. Normatif berarti memiliki batas mengenai apa yang tidak boleh dikorbankan: martabat manusia, keberlanjutan, hukum, dan kesempatan warga untuk berpartisipasi. Diplomasi tanpa prinsip mudah berubah menjadi ketergantungan, sementara prinsip tanpa kemampuan berunding hanya menghasilkan pernyataan. Keduanya perlu berjalan bersama.

Masyarakat juga memiliki peran dalam membentuk arah. Pilihan konsumsi, penggunaan data, kepatuhan pajak, partisipasi organisasi, dan cara memperlakukan kelompok lain memengaruhi kualitas institusi. Tanggung jawab tidak boleh dipindahkan sepenuhnya kepada individu, sebab struktur ekonomi membatasi pilihan. Namun, demokrasi yang matang memerlukan warga yang bersedia memeriksa informasi dan menolak solusi yang menjadikan kelompok rentan sebagai kambing hitam.

Bagi lembaga pendidikan dan organisasi bisnis, pesan utamanya adalah mengembangkan kemampuan belajar. Rencana lima tahun tetap diperlukan, tetapi harus dilengkapi mekanisme peninjauan dan indikator dini. Kegagalan kecil yang terbuka lebih mudah diperbaiki daripada keberhasilan semu yang dipertahankan melalui propaganda. Organisasi yang mampu berkata bahwa asumsi mereka berubah memiliki peluang lebih besar untuk bertahan daripada organisasi yang menolak fakta karena takut kehilangan citra.

Masa depan tidak tersedia sebagai objek yang tinggal ditemukan. Ia dibentuk oleh keputusan, konflik, dan kerja sama yang berlangsung sekarang. Ekonomi politik ketidakpastian mengajak kita melihat hubungan tersebut secara jernih: setiap strategi mempunyai biaya, setiap ketergantungan memiliki sisi politik, dan setiap krisis membuka kemungkinan perubahan institusi. Tugas yang paling bertanggung jawab adalah memperluas pilihan generasi berikutnya, bukan mengunci mereka pada keputusan yang dibuat tanpa transparansi.

26. Perusahaan, Kelas Menengah, dan Kontrak Sosial

Perusahaan berada di garis depan perubahan karena mereka menerima sinyal pasar sebelum kebijakan publik selesai dirumuskan. Mereka melihat perubahan permintaan, biaya logistik, regulasi, dan teknologi secara langsung. Namun, kemampuan perusahaan tidak tersebar merata. Korporasi besar dapat mengalihkan pemasok, menahan kas, dan membeli keahlian, sedangkan usaha kecil menghadapi guncangan dengan cadangan tipis. Kebijakan ekonomi yang menganggap semua perusahaan memiliki kapasitas sama akan memperbesar ketimpangan.

Kelas menengah memiliki posisi penting dalam kontrak sosial. Mereka sering menanggung pajak, biaya pendidikan, cicilan, dan risiko pekerjaan, tetapi tidak selalu memperoleh perlindungan yang dirasakan memadai. Ketika mobilitas sosial melambat, kekecewaan dapat beralih menjadi penolakan terhadap institusi. Pemerintah perlu memperluas akses terhadap perumahan, layanan kesehatan, pendidikan bermutu, dan pensiun. Stabilitas politik tidak hanya bergantung pada bantuan untuk kelompok termiskin, tetapi juga pada harapan yang wajar bagi mereka yang sedang bekerja dan berusaha.

Tanggung jawab korporasi tidak cukup dipahami sebagai kegiatan filantropi. Yang lebih penting adalah bagaimana perusahaan membayar pajak, memperlakukan pekerja, mengelola dampak lingkungan, dan menyampaikan risiko kepada konsumen. Standar pelaporan keberlanjutan dapat membantu, tetapi perlu mencegah greenwashing. Investor juga perlu menilai kualitas tata kelola, bukan hanya keuntungan kuartalan. Dalam pasar yang tidak pasti, perusahaan yang dipercaya memiliki modal reputasi yang nyata.

Kemitraan pemerintah dan dunia usaha dapat mempercepat respons terhadap krisis, misalnya melalui produksi alat kesehatan, pengembangan energi, atau pemulihan logistik. Kemitraan tersebut harus memiliki aturan konflik kepentingan dan target yang dapat diaudit. Bantuan publik perlu dikaitkan dengan kewajiban tertentu, seperti mempertahankan pekerjaan, berbagi teknologi, atau memenuhi standar lingkungan. Dengan demikian, dukungan negara menjadi investasi kemampuan, bukan hadiah tanpa pertanggungjawaban.

Kontrak sosial baru perlu mengakui perubahan cara kerja dan sumber penghasilan. Pekerjaan platform, kerja jarak jauh, dan otomatisasi menantang definisi lama mengenai hubungan kerja. Perlindungan dasar harus mengikuti manusia, bukan semata-mata jenis kontraknya. Data ketenagakerjaan yang lebih baik dapat membantu merancang manfaat yang portabel. Negara, perusahaan, dan pekerja perlu menyepakati bahwa fleksibilitas harus berjalan bersama keamanan, bukan menggantikan keamanan.

27. Kepemimpinan Asia dan Multilateralisme yang Praktis

Asia merupakan kawasan dengan pertumbuhan, konflik, inovasi, dan keragaman politik yang berjalan bersamaan. Kekuatan ekonomi Asia membuat keputusan di kawasan ini memengaruhi harga, teknologi, dan aturan global. Namun, tidak ada satu negara yang dapat mengelola semua persoalan sendiri. Krisis iklim, wabah, pembajakan, keamanan siber, dan gangguan rantai pasok membutuhkan kerja sama yang melampaui aliansi tradisional.

Multilateralisme yang praktis tidak harus dimulai dari kesepakatan besar. Ia dapat dibangun melalui proyek yang menyelesaikan masalah nyata: koridor logistik, pengakuan kualifikasi tenaga kerja, pertukaran data cuaca, interoperabilitas pembayaran, atau cadangan obat regional. Keberhasilan kecil menciptakan kepercayaan dan mengurangi biaya koordinasi. Forum yang terlalu luas tetap diperlukan untuk legitimasi, tetapi implementasi sering lebih efektif melalui kelompok negara yang memiliki kepentingan dan kapasitas serupa.

Indonesia dapat mengambil peran sebagai convenor, yaitu negara yang mempertemukan kepentingan tanpa selalu menjadi pemimpin yang memerintah. Peran tersebut membutuhkan reputasi sebagai mitra yang dapat diprediksi dan bersedia mendengar. Diplomasi harus didukung oleh analisis domestik yang kuat, karena komitmen internasional tanpa kapasitas pelaksanaan hanya akan menimbulkan kekecewaan. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan universitas dapat menjadi aktor diplomasi tambahan dalam bidang yang mereka kuasai.

Kerja sama Asia juga perlu memasukkan suara masyarakat. Proyek lintas batas dapat memindahkan dampak lingkungan atau tenaga kerja jika hanya dinegosiasikan oleh pemerintah dan investor. Standar sosial, mekanisme keluhan, dan transparansi pembiayaan akan meningkatkan legitimasi. Keterlibatan masyarakat bukan hambatan bagi pembangunan; ia membantu menemukan masalah sebelum menjadi konflik antarnegara.

Dunia yang rival tidak selalu berarti dunia tanpa aturan. Aturan dapat bertahan jika memiliki manfaat, dapat diawasi, dan memberi ruang bagi perubahan. Indonesia perlu memperjuangkan aturan yang mencegah pemaksaan, memperluas akses teknologi, serta menghormati kebutuhan pembangunan. Kepemimpinan Asia akan dinilai bukan dari banyaknya deklarasi, melainkan dari kemampuannya menghasilkan keamanan, kemakmuran, dan ruang pilihan bagi masyarakat yang beragam.

28. Kesimpulan: Politik yang Mampu Hidup dengan Ketidakpastian

Ekonomi politik dunia memasuki fase ketika krisis dan rivalitas saling memperkuat. Perang menaikkan harga energi, perubahan teknologi mengubah rantai nilai, iklim mengurangi kepastian pembangunan, dan utang membatasi pilihan anggaran. Pada saat yang sama, ketidakpercayaan domestik menjadikan setiap penyesuaian ekonomi sebagai persoalan legitimasi. Globalisasi tidak lenyap, tetapi berlangsung dalam bentuk yang lebih bersyarat, lebih diawasi, dan lebih dipengaruhi oleh keamanan.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi faktor utama, tetapi bukan satu-satunya penentu. Negara-negara menengah dan Global South memiliki kapasitas untuk membentuk hasil apabila mereka memperkuat kerja sama, membangun kemampuan, dan menegosiasikan kepentingannya secara konsisten. Indonesia tidak perlu memilih antara keterbukaan tanpa perlindungan dan kedaulatan tanpa koneksi. Pilihan yang lebih realistis adalah keterbukaan strategis: terhubung dengan banyak pihak, membatasi ketergantungan pada sektor kritis, dan memastikan manfaat ekonomi diperluas melalui institusi yang akuntabel.

Ketidakpastian tidak dapat dihapus oleh proyeksi, teknologi, atau kekuasaan eksekutif. Ia dapat dikelola melalui pengetahuan yang rendah hati, skenario yang beragam, cadangan yang memadai, institusi yang dapat dipercaya, serta perlindungan bagi kelompok yang paling rentan. Pemerintah perlu berani mengakui batas informasi dan menjelaskan alasan di balik pilihan. Perusahaan perlu memasukkan dampak sosial dan ekologis ke dalam strategi. Warga perlu memiliki ruang untuk mengawasi dan mengoreksi.

Pada akhirnya, pertanyaan utama bukan apakah dunia akan kembali stabil seperti masa lalu. Kemungkinan besar, bentuk stabilitas baru akan lebih berlapis dan selalu dinegosiasikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah perubahan, siapa yang menanggung biayanya, dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ekonomi politik yang demokratis tidak menjanjikan masa depan tanpa guncangan. Ia berupaya memastikan bahwa ketika guncangan datang, masyarakat memiliki institusi, solidaritas, dan pilihan untuk menghadapinya secara adil.

Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan perlu diperluas. Pertumbuhan penting, tetapi harus dibaca bersama kualitas pekerjaan, ketahanan rumah tangga, pemerataan kesempatan, kesehatan lingkungan, dan kemampuan institusi untuk belajar. Ukuran yang lebih kaya mencegah pemerintah mengejar target yang tampak baik dalam jangka pendek tetapi memperbesar kerentanan dalam jangka panjang. Evaluasi kebijakan harus menanyakan bukan hanya berapa besar output bertambah, melainkan juga siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang membayar, dan apakah kapasitas masyarakat meningkat.

Perspektif tersebut menempatkan warga sebagai subjek, bukan sekadar angka dalam model. Ketika kebijakan dibuat dengan mengakui pengalaman konkret masyarakat, pemerintah dapat

menemukan risiko yang tidak tertangkap oleh indikator makro. Ketika keputusan dijelaskan dan dapat digugat melalui prosedur yang sah, konflik menjadi bagian dari pembelajaran demokratis. Inilah dasar etis untuk menghadapi dunia yang tidak pasti: memperluas kapasitas bersama agar perubahan tidak selalu diterjemahkan menjadi kehilangan bagi kelompok yang sama.

Glossarium

Istilah berikut digunakan dalam artikel untuk menjaga konsistensi pengertian dan membantu pembaca menelusuri konsep utama.

Istilah	Pengertian
De-risking	Strategi mengurangi ketergantungan pada pemasok, teknologi, atau pasar yang dianggap memiliki risiko strategis, tanpa harus memutus seluruh hubungan ekonomi.
Diversifikasi	Penyebaran sumber pemasok, pasar, produk, teknologi, atau pembiayaan agar kegagalan satu sumber tidak melumpuhkan sistem.
Ekonomi politik internasional	Kajian mengenai hubungan timbal balik antara kekuasaan politik, aturan global, produksi, perdagangan, dan distribusi sumber daya.
Goeconomics	Penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik, termasuk sanksi, subsidi, tarif, bantuan, dan kontrol teknologi.
Global South	Istilah politik-ekonomi untuk negara-negara yang umumnya menghadapi keterbatasan struktural dalam sistem global dan sejarah ketimpangan pembangunan.
Hilirisasi	Pengembangan tahap pengolahan dan produksi lanjutan di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya.
Ketahanan (resilience)	Kemampuan sistem untuk menyerap guncangan, mempertahankan fungsi penting, pulih, dan beradaptasi.
Ketidakpastian	Keadaan ketika kemungkinan hasil, probabilitas, atau aturan yang relevan tidak dapat diketahui secara memadai.
Kedaulatan digital	Kemampuan negara dan masyarakat mengatur data, infrastruktur, standar, serta keamanan teknologi digital sesuai kepentingan publik.
Krisis	Momen ketika gangguan mengancam fungsi penting dan memerlukan keputusan cepat dalam kondisi informasi yang terbatas.
Mineral kritis	Bahan mineral yang penting bagi industri atau keamanan dan memiliki risiko pasokan, konsentrasi produksi, atau substitusi yang terbatas.
Otonomi strategis	Kemampuan untuk menentukan pilihan kebijakan dan menolak tekanan eksternal tanpa memutus hubungan dengan dunia.
Perlindungan sosial adaptif	Sistem bantuan yang dapat diperluas, diubah, dan diarahkan secara cepat ketika guncangan ekonomi atau bencana terjadi.
Premi risiko	Tambahan imbal hasil yang diminta investor sebagai kompensasi atas kemungkinan kerugian atau ketidakpastian yang lebih tinggi.

Istilah	Pengertian
Rantai pasok	Rangkaian kegiatan, pemasok, infrastruktur, dan distribusi yang memungkinkan barang atau layanan diproduksi dan sampai kepada pengguna.
Securitization	Proses membingkai isu ekonomi, sosial, atau teknologi sebagai masalah keamanan yang memerlukan tindakan luar biasa.
Semikonduktor	Material dan perangkat elektronik yang mengendalikan arus listrik dan menjadi komponen dasar teknologi digital modern.
Strategic autonomy	Lihat otonomi strategis; istilah yang sering digunakan dalam diskursus kebijakan internasional.
Transisi energi	Perubahan sistem energi menuju sumber dan teknologi yang lebih rendah emisi dengan mempertimbangkan keandalan dan keadilan.
Weaponized interdependence	Pemanfaatan posisi dominan dalam jaringan ekonomi global untuk memantau, membatasi, atau memaksa aktor lain.
Friend-shoring	Penataan rantai pasok melalui negara-negara yang dianggap memiliki hubungan politik dan keamanan yang lebih dapat dipercaya.
Just transition	Transisi ekonomi dan teknologi yang memperhatikan perlindungan pekerja, masyarakat terdampak, dan distribusi biaya-manfaat.
Horizon scanning	Proses sistematis mencari sinyal awal, tren, dan perubahan yang dapat memengaruhi kebijakan pada masa depan.
Ruang fiskal	Kapasitas pemerintah untuk menambah belanja atau memberi stimulus tanpa mengganggu keberlanjutan keuangan publik.
Autarki	Upaya memenuhi kebutuhan ekonomi secara hampir sepenuhnya dari dalam negeri; biasanya mahal dan sulit dipertahankan.

Daftar Pustaka

Disusun dengan gaya APA edisi ke-7. DOI dicantumkan untuk sumber yang memiliki pengenal DOI; sumber laporan menggunakan tautan resmi penerbit.

Acharya, A. (2014). *The end of American world order*. Polity Press.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown.

Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press.

Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *The Journal of Law and Economics*, 3(1), 1–44. <https://doi.org/10.1086/466560>

Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security*, 44(1), 42–79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

Frieden, J. A. (1991). Invested interests: The politics of national economic policies in a world of global finance. *International Organization*, 45(4), 559–588. <https://doi.org/10.1017/S0020818300035432>

Gilpin, R. (2001). *Global political economy: Understanding the international economic order*. Princeton University Press.

Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political science and the three new institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936–957. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>

Helleiner, E. (2014). *The status quo crisis: Global financial governance after the 2008 financial meltdown*. Oxford University Press.

Ikenberry, G. J. (2018). The end of liberal international order? *International Affairs*, 94(1), 7–23. <https://doi.org/10.1093/ia/iix241>

International Energy Agency. (2025). *World energy outlook 2025*. IEA. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025>

International Monetary Fund. (2026). *World economic outlook: Global economy in crosscurrents of war and technology*. IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/WEQ>

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Longman.

Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD economic outlook, volume 2025 issue 1*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/83363382-en>

Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton.

Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. *Journal of International Business Policy*, 1, 12–33. <https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4>

Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton.

Strange, S. (1996). *The retreat of the state: The diffusion of power in the world economy*. Cambridge University Press.

Tooze, A. (2018). *Crashed: How a decade of financial crises changed the world*. Viking.

United Nations Development Programme. (2025). *Annual report 2025*. UNDP. <https://www.undp.org/home>

World Bank. (2026). *Global economic prospects: June 2026*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>

World Trade Organization. (2025). *Global trade outlook and statistics*. WTO. https://www.wto.org/english/res_e/statist_e/gtos_e/gtos_e.htm